

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Pembangunan ekonomi pada hakikatnya merupakan sebuah proses multidimensional yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional, di samping percepatan pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pembangunan nasional merupakan salah satu cara untuk mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera (Zahrotussolichah & Septiani, 2022). Salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi adalah penurunan tingkat kemiskinan. Tingginya angka kemiskinan mencerminkan belum optimalnya distribusi hasil pembangunan dan menunjukkan adanya ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi.

Kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang tidak hanya memiliki tingkat pendapatan yang rendah, tetapi juga memiliki akses yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, pergi ke sekolah, mendapatkan perawatan medis, atau berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi yang menguntungkan. Selama bertahun-tahun, kemiskinan telah menjadi perhatian global. Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau kelompok masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, bukan sekadar kekurangan uang.

Secara nasional, masalah kemiskinan masih menjadi isu strategis yang terus dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Meskipun berbagai kebijakan telah dilakukan untuk menekan angka kemiskinan, seperti program bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, namun penurunan kemiskinan cenderung berjalan lambat dan tidak merata antar wilayah. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan kapasitas ekonomi daerah, struktur ekonomi, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Tingkat kemiskinan tetap menjadi indikator paling sensitif sekaligus paling urgen dalam menilai keberhasilan atau kegagalan sebuah rezim pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Secara nasional, meskipun Indonesia telah berhasil mencapai status *Upper-Middle Income Country*, tantangan kemiskinan tetap bersifat struktural dan persisten. Kemiskinan bukan sekadar masalah rendahnya pendapatan per kapita, melainkan sebuah fenomena kompleks yang mencerminkan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan layanan dasar. Kegagalan dalam menekan angka kemiskinan sering kali menjadi muara dari seluruh kebijakan publik yang tidak tepat sasaran, yang pada akhirnya menciptakan siklus eksklusi sosial yang sulit diputus tanpa adanya intervensi kebijakan fiskal yang fundamental dan terukur. Dengan demikian, kemiskinan tidak hanya menjadi persoalan nasional, tetapi juga sangat bergantung pada kinerja ekonomi di tingkat daerah.

Penurunan tingkat kemiskinan dalam perspektif ekonomi pembangunan sangat bergantung pada dinamika pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Variabel ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja suatu perekonomian dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan. Setiap negara berupaya menekan angka kemiskinan sekaligus

mendorong pertumbuhan ekonomi agar mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal. pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan tingkat kemiskinan yang berarti bahwa kemajuan aktivitas ekonomi nasional secara nyata mampu mengurangi tingkat kemiskinan (Sari et al., 2022).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sevigo & Lathifah (2024) menganalisis bagaimana kesehatan keuangan pemerintah daerah memengaruhi kondisi ekonomi di Kabupaten Sidoarjo. Ditemukan bahwa kemampuan keuangan daerah berkontribusi secara searah terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, ketika kinerja keuangan pemerintah daerah dikelola dengan baik dan dialokasikan secara tepat sasaran, hal tersebut akan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan daerah secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnama (2016) menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, setiap terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan secara nyata. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Najib Putri & Yuliana (2023) bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap tingkat kemiskinan. Begitu pula dengan tingkat pengangguran yang ditemukan tidak memengaruhi kemiskinan secara nyata.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam menilai kinerja pembangunan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, serta peluang kerja yang lebih luas. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan penurunan kemiskinan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nansadiqa (2024) menemukan bahwa dalam jangka pendek, guncangan atau

perubahan pada pertumbuhan ekonomi memiliki dampak yang nyata terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Namun, apabila dilihat dalam perspektif jangka menengah maupun jangka panjang, pengaruh dari guncangan pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi tidak terlihat atau tidak memberikan dampak yang berkelanjutan terhadap perubahan tingkat kemiskinan. Dalam banyak kasus, pertumbuhan ekonomi justru disertai dengan meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan, yang tercermin dalam nilai *Gini ratio*. Ketimpangan yang tinggi menunjukkan bahwa hasil pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Gini ratio sebagai indikator ketimpangan memiliki peran penting dalam menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Ketimpangan yang tinggi dapat menghambat efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan. Apabila angka *Gini ratio* berada pada level yang tinggi, maka efek rembesan ke bawah (*trickle-down effect*) dari pertumbuhan ekonomi akan terhambat. Hal ini karena sebagian besar hasil pertumbuhan ekonomi cenderung hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu, sementara kelompok masyarakat miskin tidak memperoleh manfaat yang signifikan. Oleh karena itu, dalam menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, perlu mempertimbangkan peran ketimpangan sebagai variabel moderasi.

Upaya pemerintah untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalah dengan penetapan otonomi daerah. Dalam kerangka desentralisasi fiskal yang mulai diterapkan sejak era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran yang semakin besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Otonomi daerah memberikan

kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi dan potensi daerah masing-masing. Namun demikian, keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung pada kualitas pengelolaan keuangan daerah itu sendiri.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan tercermin dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya secara efektif, efisien, dan mandiri. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amsyah & Sudari (2025) menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik serta kemampuan daerah dalam melakukan diversifikasi ekonomi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif menjadi kunci utama untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Kinerja keuangan daerah yang optimal akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, serta penyediaan layanan publik yang berkualitas. Sebaliknya, pengelolaan keuangan yang tidak optimal dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana dituturkan pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18 ayat 2 tentang otonomi daerah dimana setiap masing-masing pemerintah daerah mengatur dan mengelola kebutuhan pemerintah mereka sendiri linier dengan asas otonomi dan tugas perbantuan. Tujuan otonomi daerah yakni mendorong pelayanan dan daya saing suatu daerah agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengelola APBD guna menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Tiga pilar

utama yang menjadi determinan keberhasilan ini adalah kemandirian, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan.

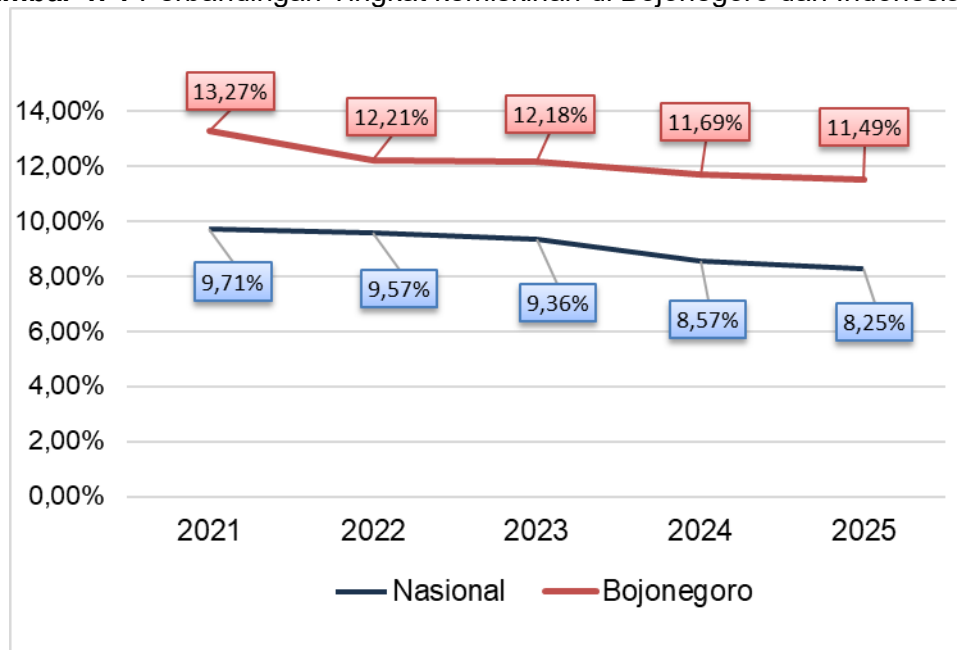
Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dari sumber pendapatan asli daerah (PAD) tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah, maka semakin besar kemampuan daerah dalam menentukan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Efektivitas pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan. Efektivitas yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mencapai target yang telah direncanakan, sehingga dapat mendukung pelaksanaan program pembangunan secara optimal. Efisiensi pengelolaan keuangan daerah menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menggunakan sumber daya yang tersedia secara hemat dan tepat guna untuk menghasilkan output yang maksimal.

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian oleh Sevigo & Lathifah (2024) menemukan bahwa kinerja keuangan daerah yang diukur melalui rasio efektivitas, efisiensi, dan kemandirian memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa rasio efektivitas berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara efisiensi tidak selalu memberikan pengaruh yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan keuangan daerah menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Praktiknya, pengelolaan keuangan daerah di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti rendahnya kemandirian fiskal, ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, serta belum optimalnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Permasalahan ini menyebabkan kinerja pembangunan daerah belum maksimal, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks regional, Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia memiliki karakteristik ekonomi yang beragam antar kabupaten/kota. Beberapa daerah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sementara daerah lainnya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan masing-masing daerah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya.

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki karakteristik ekonomi yang unik. Daerah ini dikenal sebagai salah satu penghasil minyak dan gas bumi (migas) terbesar di Indonesia, sehingga memiliki kapasitas fiskal yang relatif tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Pendapatan daerah yang besar, terutama dari dana bagi hasil migas, seharusnya dapat menjadi modal utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, realitas yang terjadi tingkat kemiskinan di Bojonegoro masih diatas rata-rata nasional. Berdasarkan data tingkat kemiskinan yang diperoleh dari badan pusat statistik, ditunjukkan sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Perbandingan Tingkat kemiskinan di Bojonegoro dan Indonesia (%)

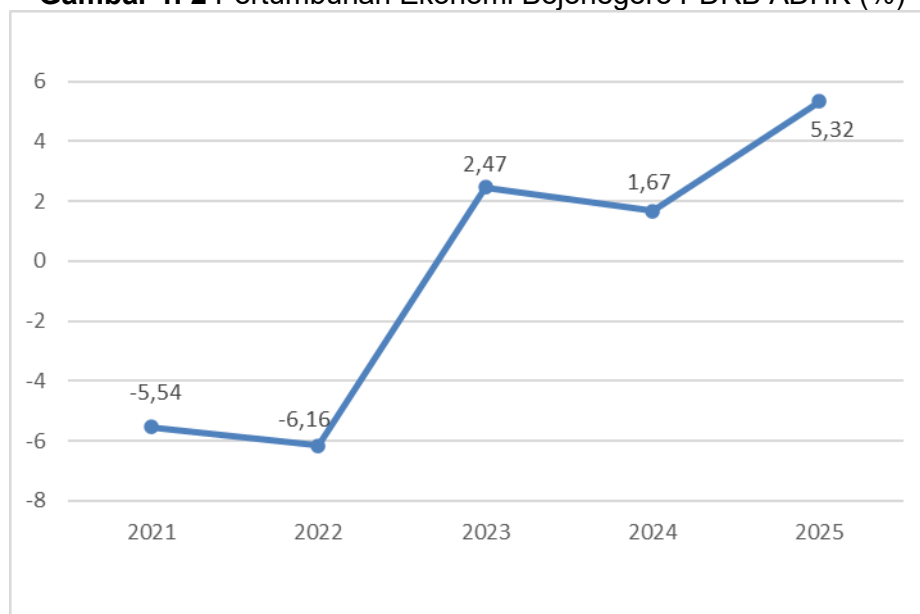
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia 2025

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa Kabupaten Bojonegoro meskipun dalam lima tahun terakhir mengalami tren positif yang ditandai dengan penurunan angka kemiskinan, namun masih belum benar-benar mampu menekan kemiskinan dan masih menyentuh nilai diatas rata-rata kemiskinan nasional walaupun termasuk daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang besar. tingkat kemandirian keuangan daerah yang rendah dan cenderung bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, adanya fenomena Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang tinggi menunjukkan bahwa anggaran yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal, yang mengindikasikan rendahnya efektivitas pengelolaan keuangan daerah .

Kondisi tersebut menjadi menarik untuk diteliti karena terdapat paradoks antara kapasitas fiskal yang tinggi dengan kinerja pengelolaan keuangan yang belum optimal. Di satu sisi, Bojonegoro memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan keuangan daerah yang baik. Namun

di sisi lain, berbagai indikator menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah masih belum sepenuhnya efektif, efisien, dan mandiri. Selain itu, perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro juga menunjukkan dinamika yang menarik. Berikut sajian data mengenai pertumbuhan ekonomi di Bojonegoro yang diukur melalui PDRB atas dasar harga konstan yang diperoleh dari badan pusat statistik:

Gambar 1. 2 Pertumbuhan Ekonomi Bojonegoro PDRB ADHK (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoro 2025

Sebagai daerah berbasis sumber daya alam, pertumbuhan ekonomi Bojonegoro sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak dunia dan produksi migas. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi cenderung tidak stabil. Di sisi lain, sektor non-migas masih belum berkembang secara optimal, sehingga ketergantungan terhadap sektor migas masih cukup tinggi. Diperlukan kebijakan diversifikasi ekonomi yang lebih terfokus pada sektor non-migas yang terukur dan efektif untuk lepas dari belenggu ketergantungan terhadap sektor migas. Amsyah & Sudari (2025) menjelaskan bahwa kemampuan daerah dalam melakukan

diversifikasi ekonomi dan menciptakan ekosistem investasi yang kondusif menjadi kunci utama untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara kinerja keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian oleh Sevigo & Lathifah (2024) menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka semakin besar pula fleksibilitas pemerintah daerah dalam mendorong aktivitas ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. Dengan demikian, kemandirian fiskal menjadi salah satu indikator penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Penelitian Sevigo & Lathifah (2024) juga menegaskan bahwa rasio efektivitas yang tinggi mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan dan belanja secara optimal, sehingga mampu meningkatkan kualitas belanja publik. Belanja yang efektif akan berdampak langsung pada peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, dan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Berbeda dengan efektivitas, efisiensi keuangan daerah menunjukkan hasil yang lebih beragam dalam penelitian empiris. Beberapa studi menyatakan bahwa efisiensi keuangan daerah tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Sevigo & Lathifah, 2024). Hal ini disebabkan karena efisiensi lebih berfokus pada penghematan penggunaan anggaran, sehingga belum tentu secara langsung meningkatkan output ekonomi. Namun demikian, efisiensi tetap penting sebagai indikator kualitas pengelolaan keuangan yang mencerminkan penggunaan sumber daya secara tepat.

Penelitian Purnama (2016) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, peningkatan pertumbuhan ekonomi mampu menurunkan tingkat kemiskinan melalui peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja. Namun, hasil yang berbeda ditemukan oleh Putri & Yuliana (2023) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu bersifat inklusif, sehingga tidak seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Penelitian Istiqomah & Floresti (2024) menunjukkan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dapat dipengaruhi oleh faktor ketimpangan pendapatan yang diukur melalui *Gini ratio*. ketika ketimpangan pendapatan (*gini ratio*) diperhitungkan sebagai variabel moderasi, hasilnya menunjukkan bahwa ketimpangan mampu mempengaruhi hubungan tersebut, di mana pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan kemiskinan jika ketimpangan rendah, tetapi tidak efektif bahkan memperburuk kemiskinan jika ketimpangan tinggi.. Hal ini menunjukkan bahwa *Gini ratio* berperan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Semakin tinggi ketimpangan, maka efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan kemiskinan akan semakin rendah.

Kondisi tersebut berdampak pada tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro. Meskipun terdapat peningkatan pendapatan daerah, namun penurunan tingkat kemiskinan tidak selalu berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan sulit untuk ditekan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya inklusif. Ketimpangan distribusi

pendapatan yang tercermin dalam *Gini ratio* juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan.

Dengan demikian, penelitian mengenai pengelolaan keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kinerja keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk memahami bagaimana pertumbuhan ekonomi tersebut berdampak pada tingkat kemiskinan, dengan mempertimbangkan peran ketimpangan sebagai variabel moderasi.

Kebaruan pada penelitian ini terletak pada kinerja pengelolaan keuangan daerah sebagai variable independen yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebagai variable dependen dalam jangka Panjang dan jangka pendek dengan menggunakan pendekatan *Error Correction Model (ECM)*. Selain itu, Penelitian ini juga menganalisis hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap Tingkat kemiskinan dengan *gini ratio* sebagai variable moderasi yang berpotensi dapat memperkuat ataupun memperlemah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Tingkat kemiskinan dengan menggunakan pendekatan *Moderation Regression Analysis (MRA)*. Selain itu kebaruan pada penelitian ini menggunakan dua pendekatan diatas dalam satu kerangka. Karena sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menganalisis pengaruh langsung kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi atau pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan secara terpisah.

Kabupaten Bojonegoro layak dijadikan sebagai objek penelitian karena memiliki karakteristik yang unik, yaitu sebagai daerah dengan kapasitas fiskal tinggi namun masih menghadapi berbagai permasalahan dalam pengelolaan

keuangan daerah dan pembangunan ekonomi. Selain itu, periode penelitian 2010–2025 mencakup berbagai dinamika penting, termasuk perubahan kebijakan fiskal, fluktuasi harga minyak, serta dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian daerah. Dengan demikian, hal ini dapat memberikan informasi secara empiris sebagai langkah strategis untuk penanggulangan tingkat kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan variabel independent rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah sebagai indikator kinerja keuangan daerah, dan *gini ratio* sebagai variable moderat antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan

1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan yang dihadapi oleh suatu negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia, terus mengalami dinamika dari tahun ke tahun, khususnya dalam aspek pembangunan ekonomi dan kemiskinan. Kedua isu tersebut memiliki keterkaitan yang erat serta dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berperan sebagai pendorong maupun penghambat. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan secara komprehensif, penelitian ini merumuskan masalah utama yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah di Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana hubungan pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro?
3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Tingkat kemiskinan dengan *gini ratio* sebagai variable moderasi di Kabupaten Bojonegoro?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah dan sasaran utama yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini. Perumusan tujuan penelitian dilakukan untuk memberikan kejelasan mengenai fokus kajian yang akan dianalisis, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang relevan baik secara teoritis maupun praktis. Selain itu, tujuan penelitian ini disusun berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi, serta tingkat kemiskinan. Dengan adanya tujuan yang jelas, diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan temuan yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Bojonegoro.

1. Mengetahui kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah di Kabupaten Bojonegoro
2. Mengetahui hubungan pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro
3. Mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Tingkat kemiskinan dengan *gini ratio* sebagai variable moderasi

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian ini tidak hanya berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan. Adapun manfaat penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Berikut manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, khususnya dalam studi ekonomi pembangunan di bidang keuangan publik pada masa yang akan datang. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya teori yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Dengan mempertimbangkan keterbatasan maupun kelemahan yang terdapat dalam penelitian ini, diharapkan kajian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut di bidang terkait.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pedoman dalam upaya pemenuhan jangka panjang maupun jangka pendek di bidang keuangan publik dalam konteks keuangan daerah khususnya, terkait pertumbuhan ekonomi daerah dan penekanan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro secara berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu berguna untuk pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai tambahan informasi dan saran terkait dalam pembuatan kebijakan-kebijakan baru yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi dan upaya menekan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada lingkup keuangan publik dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro yang menggunakan analisis data time series pada tahun 2010 hingga 2025 dengan menggunakan *Error Correction Model (ECM)* dengan

variabel rasio efisiensi keuangan daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, rasio kemandirian daerah, pertumbuhan ekonomi, dan *MRA analyst* antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan dengan *gini ratio* sebagai variable moderasi.